

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

A. Penguatan Kelembagaan dalam Mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una masih belum menjadi urusan seluruh instansi. Pengarusutamaan gender menjadi subordinat dan dijalankan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Penguatan kelembagaan adalah salah satu strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una.

Terdapat 5 dimensi dalam penguatan kelembagaan yaitu, struktur organisasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama (network). Dalam penguatan kelembagaan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah dilakukan pada 5 dimensi meskipun masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan kebijakan pengarusutamaan gender masih tergolong baru di Kabupaten Tojo Una-Una.

Dari kelima dimensi ini, dimensi keuangan dan kerjasama yang paling menunjukkan keseriusan yang terealisasi melalui alokasi anggaran adanya bentuk kerjasama dengan pihak eksternal dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Sedangkan untuk dimensi organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana masih memerlukan upaya lebih untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penguatan Kelembagaan dalam Mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017

Dalam rangka penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017 memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain adalah kepemimpinan dan komitmen bersama. Sedangkan untuk faktor penghambat adalah reformasi kelembagaan. Ketiga hal ini memang sangat mempengaruhi penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017.

2. Saran dan Rekomendasi

Adapun saran dari penulis mengenai penelitian penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengarusutamaan gender harus dilaksanakan oleh seluruh instansi yang berada di Kabupaten Tojo Una-Una. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah dapat menjadi pioneer dalam penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una harus membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pengarusutamaan gender yang terdiri dari seluruh OPD yang berada di Kabupaten Tojo Una-Una dan juga focal point di setiap SKPD untuk mengintegrasikan isu gender di dalam bidang urusan pembangunannya. Sehingga pengarusutamaan gender menjadi bagian dari setiap urusan bidang pembangunan di daerah.
- c. Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tojo Una-Una kiranya bisa lebih responsif memberikan dukungan politis maupun dukungan pendanaan terhadap perwujudan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una.
- d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una harus memperluas jaringan komunikasi dan koordinasinya kepada berbagai pihak terkait untuk memperoleh dukungan partisipasi dalam rangka untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una
- e. Membuka ruang seluas-luasnya kepada lembaga pemerhati gender untuk berpartisipasi dalam program kesetaraan gender dalam rangka untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una.

- f. Mengajak seluruh komponen masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan untuk turut serta mengambil bagian terhadap kegiatan yang terkait pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una.

Adapun rekomendasi dari peneliti untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender di daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender (PPRG) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat di lokasi penelitian. Penelitian ini nantinya dapat mengetahui seberapa banyak OPD yang memasukkan isu gender ke dalam bidang urusannya.
- b. Menganalisis partisipasi ataupun peran laki-laki dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender. Penelitian ini nantinya dapat mengetahui peran atau posisi laki-laki di dalam menanggapi isu gender itu sendiri dikarenakan ada stigma bahwa laki-laki tidak peka terhadap isu gender.
- c. Menganalisis pelaksanaan pengarusutamaan gender di organisasi-organisasi non pemerintah. Penelitian ini nantinya dapat mengetahui apakah isu gender juga menjadi perhatian bagi organisasi-organisasi di luar pemerintahan dikarenakan permasalahan gender menjadi urusan bersama di dalam kehidupan bermasyarakat yang harus bisa diatasi.